

ANALISIS PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

Anita*

*Universitas Internasional Batam, e-mail: anita.lec@uib.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of ownership structure and firm characteristics on CSR disclosure in companies listed on the Indonesia Stock Exchange. These ownership structure and firm characteristics are managerial ownership, institutional ownership, government ownership, foreign ownership, firm size, profitability, leverage, industry type, age and size of audit firm to CSR disclosure. The sample consists of 330 companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2010-2014 which are taken by purposive sampling method. Data analysis method used in this study is panel data regression. Results indicate that government ownership, foreign ownership, firm size, industry type, firm age and size of audit firm are significantly and positively related to CSR disclosure, while institutional ownership is significantly and negatively related to CSR disclosure. The results also display no significant relationship between managerial ownership, profitability, and leverage and CSR disclosure.

Keywords: ownership structure, firm characteristics, CSR disclosure.

PENDAHULUAN

Pandangan bahwa perusahaan terpisah dari sosial dan ekologi sudah tidak dapat dipertahankan lagi saat ini. Pada tahun 1924, Sheldon memperkenalkan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pertama kalinya di lingkungan bisnis. Sejak saat itu, kesadaran di seluruh dunia tentang dampak bisnis terhadap masyarakat telah meningkat secara signifikan dan perusahaan mendapat tekanan lebih besar dari masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berperilaku secara bertanggung jawab. Salah satu faktor yang mendorong meningkatnya tekanan dari pemangku kepentingan adalah keserakahan perusahaan dalam melakukan pemborosan sumber daya alam, mengeksploitasi pekerja, mencemari dan merusak lingkungan tanpa memperhatikan efek negatifnya bagi masyarakat dan ekologi (Habbash, 2016). Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk memadukan tujuan ekonomi dan sosial bersama-sama dengan melaksanakan kegiatan CSR dan mengungkapkan informasi mengenai kegiatan CSR dalam laporan tahunan.

Kesadaran tentang pentingnya mempraktikkan CSR menjadi tren dunia seiring dengan semakin maraknya perilaku menyimpang dari perusahaan yang terlihat dari beberapa bencana sosial dan lingkungan. Misalnya, sebuah tragedi pelepasan gas beracun terjadi pada tanggal 3 Desember 1984 di India yang menyebabkan sekitar 16.000 orang meninggal dalam beberapa hari. Selanjutnya, pada tanggal 26 April 1986, pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina meledak menyebabkan beberapa kematian dan menciptakan kondisi sosial dan lingkungan yang berbahaya. Oleh karena itu, perusahaan menghadapi tekanan yang lebih besar untuk bertindak secara sosial dan beroperasi secara bertanggung jawab daripada sebelumnya (Habbash, 2016).

Konsep CSR juga telah dibuat populer di Indonesia karena insiden lingkungan terkenal di Indonesia, seperti banjir lumpur panas yang disebabkan oleh perusahaan minyak dan gas bumi, Lapindo Brantas. Insiden ini menyebabkan terendamnya delapan desa dan 13.000 orang harus diungsikan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan tambang terbesar dunia, Grasberg di Papua Barat. Perusahaan tambang emas, Newmont yang telah menyebabkan polusi arsen dalam air minum masyarakat di Teluk Buyat dan juga diduga menyebabkan kematian yang tinggi anak-anak dan perempuan. Kasus-kasus ini semakin membuka mata masyarakat umum, pemerintah dan korporasi tentang pentingnya CSR (Setyorini & Ishak, 2012).

Banyaknya masalah sosial yang terjadi menuntut perusahaan untuk mengungkapkan informasi CSR mereka pada laporan keuangan sesuai dengan tuntutan para pemangku kepentingan. Pada zaman modern ini, para pemangku kepentingan tidak hanya melihat angka profit yang perusahaan dapatkan, tetapi juga mempertanyakan apa kontribusi perusahaan terhadap masyarakat (Yekinni, 2008). Selain itu, pengungkapan informasi CSR pada laporan keuangan juga dilihat oleh investor sebagai hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi (Chek, Mohamad, Yunus & Norwani, 2013).

Selain itu, penelitian oleh Fombrun, Gardberg, dan Sever (2000) menemukan bahwa pengungkapan CSR dapat meningkatkan kemampuan bisnis untuk menarik sumber daya, meningkatkan kinerja dan mengembangkan keunggulan kompetitif sambil memuaskan kebutuhan para pemangku kepentingan. Pengungkapan CSR juga memiliki kemampuan untuk menentukan reputasi perusahaan (Ramdhony & Oogarah-Hanuman, 2012), meningkatkan lisensi untuk beroperasi dan meningkatkan keberlanjutan bisnis (Herbohn, Walker, & Loo, 2014), serta memperbaiki kinerja keuangan (Yusoff, Mohamad, & Darus, 2013).

Luas dan isi pengungkapan CSR berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Perbedaan luas dan isi pengungkapan dapat dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa faktor seperti tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan. Bhimani dan Soonawalla (2005) dalam Esa dan Ghazali (2011) mengemukakan bahwa tata kelola perusahaan dan CSR adalah dua sisi dari koin yang sama. Hal ini dikarenakan keduanya menekankan pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Tata kelola perusahaan dan CSR juga menegaskan pentingnya mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga perusahaan mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan.

Selain tata kelola perusahaan, ada beberapa faktor lain yang terbukti berpengaruh pengungkapan CSR seperti tipe industri dan ukuran perusahaan (Naser dan Hassan, 2013). Karakteristik lainnya adalah profitabilitas, *leverage*, umur perusahaan dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) (Uwuigbe, 2011; Bayoud, Kavanagh, & Slaughter, 2012; Giannarakis, 2014). Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk memverifikasi pengaruh tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan CSR dengan judul “**Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility**”.

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengungkapan CSR

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), definisi CSR adalah komitmen berkelanjutan oleh bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta komunitas dan masyarakat pada umumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pengungkapan CSR adalah proses penyediaan informasi mengenai kegiatan perusahaan yang mempengaruhi lingkungan dan masyarakat (Gray, Kouhy, & Lavers, 1995). Perusahaan bertanggung jawab atas informasi tersebut kepada pemangku kepentingan tertentu, terlepas dari informasi keuangan yang dipublikasikan kepada pemegang saham.

Pengungkapan informasi CSR dalam laporan keuangan di Indonesia dianjurkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang menyatakan

bahwa perusahaan dapat menyajikan laporan terpisah mengenai CSR, khususnya bagi perusahaan yang menganggap bahwa lingkungan hidup dan karyawan memegang peranan penting bagi perusahaan mereka. Selain diatur dalam PSAK, pengungkapan informasi CSR dalam laporan keuangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 66 Ayat 2c yang menyatakan bahwa laporan tahunan harus memuat laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Luas dan isi pengungkapan CSR dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan. Kepemilikan yang berbeda dapat menyebabkan tujuan dan pengambilan keputusan yang berbeda. Struktur kepemilikan dapat diklasifikasi menjadi (1) investor institusi yang secara tradisional besar dan dapat memegang sejumlah besar saham suatu perusahaan; (2) manajer yang mengetahui situasi perusahaan dan sering memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap strategi perusahaan dan investasi; (3) investor asing yang berbeda dari investor domestik dalam preferensi mereka (Won *et al.*, 2011 dalam Soliman, Din & Sakr, 2012). Dari perbedaan-perbedaan ini, diharapkan pemilik yang berbeda memiliki preferensi yang berbeda mengenai kebijakan pengungkapan CSR perusahaan.

Faktor-faktor yang membedakan perusahaan juga dapat mempengaruhi pengungkapan CSR perusahaan. Faktor-faktor ini dikenal sebagai karakteristik perusahaan yang terdiri dari ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, *leverage*, kendala sosial yang dihadapi, umur perusahaan, profil perusahaan, struktur dewan, pemilik perusahaan, negara perusahaan berdiri (Veronica, 2009 dalam Lucyanda dan Siagian, 2012).

Tata Kelola Perusahaan

World Bank mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai suatu perpaduan antara hukum, peraturan perundang-undangan dan praktik yang dilakukan oleh sektor privat atas dasar sukarela yang memungkinkan perusahaan menarik modal keuangan dan tenaga kerja, berkinerja secara efisien, dan dengan semua itu dapat secara berkesinambungan menghasilkan nilai-nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang sahamnya, dan pada saat yang bersamaan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan (Maassen, 2000 dalam Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, tata kelola perusahaan adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Pedoman umum tata kelola perusahaan di Indonesia dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pertama kali pada

tahun 1999, yang kemudian direvisi pada tahun 2001 dan 2006. Pedoman umum tata kelola perusahaan merupakan panduan bagi perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan praktek tata kelola perusahaan kepada pemangku kepentingan. Pedoman ini menjelaskan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan situasi *checks and balance*, menegakkan transparansi dan akuntabilitas, serta merealisasikan tanggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan. Ada lima asas tata kelola perusahaan yang harus diterapkan perusahaan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Lima asas ini diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (KNKG, 2006).

Tata kelola perusahaan dan CSR adalah konsep untuk membantu perusahaan mencapai keseimbangan antara operasi yang menguntungkan dan praktek etis. Dengan mencapai ini, perusahaan tidak hanya memenuhi harapan investor dan pemangku kepentingan lainnya, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap CSR. Dengan demikian, tata kelola perusahaan dan CSR tidak bisa berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem bisnis yang perusahaan ikuti dan gunakan untuk memberikan hasil (Sundarasan, Yen & Rajangam, 2016).

Struktur Kepemilikan

Kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki manajemen perusahaan. Teori agensi menyatakan bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah saham yang dimiliki oleh manajer akan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemilik perusahaan. Manajemen akan merasakan dampak langsung atas setiap keputusan yang mereka ambil karena mereka telah menjadi pemilik perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Dengan memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik akan meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan kinerja manajer sehingga manajer perusahaan akan melakukan kegiatan CSR dan mengungkapkan informasi CSR untuk meningkatkan citra sosial perusahaan dan memaksimalkan nilai perusahaan, bahkan dengan mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut (Fraser, 2005 dalam Lucyanda dan Siagian, 2012).

Kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah jumlah saham yang dimiliki institusi atau lembaga. Pemegang saham institusi umumnya memiliki persentase kepemilikan saham yang cukup besar karena mereka memiliki sumber dana yang besar. Investasi pemegang saham institusi begitu besar sehingga pemegang saham institusi memiliki kemampuan yang lebih kecil dibandingkan pemegang saham individu untuk masuk dan keluar dari sebuah investasi. Akibatnya, pemegang saham institusi memiliki minat yang kuat tidak hanya dalam

kinerja keuangan perusahaan di mana mereka berinvestasi, tetapi juga dalam strategi, kegiatan, dan pemangku kepentingan lainnya dari perusahaan. Sehingga perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar akan melaksanakan CSR dan mengungkapkannya pada laporan keuangan untuk membangun reputasi perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan dan pada akhirnya pemegang saham institusi dapat melihat manfaat jangka panjang dari keterlibatan perusahaan dalam kegiatan CSR tersebut (Fauzi, Mahoney & Rahman, 2007).

Kepemilikan pemerintah. Kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham yang dimiliki pemerintah. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang besar lebih sensitif secara politis karena kegiatan perusahaan ini lebih disorot mata publik. Perusahaan ini menjadi sorotan publik karena secara tidak langsung perusahaan tersebut dimiliki oleh masyarakat luas, sehingga masyarakat luas memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap perusahaan yang dimiliki pemerintah dibandingkan perusahaan swasta. Dengan demikian, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang besar lebih terlibat dalam kegiatan sosial. Selanjutnya harus bertanggung jawab dalam mengungkapkan kegiatan sosial tersebut untuk melegitimasi keberadaan mereka (Ghazali, 2007).

Kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki investor asing. Tingkat kepemilikan asing yang semakin tinggi menunjukkan pengaruh yang lebih besar dari praktek asing. Tren pelaksanaan CSR di negara berkembang telah banyak dipengaruhi oleh praktek manajemen gaya barat, di mana mereka memiliki tingkat keterlibatan sosial yang tinggi (Soliman *et al.*, 2012). Sebagian besar negara-negara asing memiliki aturan perlindungan lingkungan yang cukup ketat. Negara-negara tersebut juga memiliki persyaratan pengungkapan wajib untuk mengungkapkan kegiatan CSR di dalam atau di luar laporan keuangan. Sehingga sebagian besar investor berasal dari negara-negara asing menempatkan prioritas tinggi pada pembangunan berkelanjutan. Akibatnya, perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi akan mengikuti tren, strategi rencana bisnis dan kebijakan mereka yakni melaksanakan kegiatan sosial dan memastikan informasi tersebut dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan (Amran dan Devi, 2008).

Karakteristik Perusahaan

Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah variabel yang sering digunakan untuk menjelaskan sejauh mana perusahaan mengungkapkan CSR. Perusahaan-perusahaan besar diharapkan memiliki sumber daya keuangan dan manusia untuk mengkompilasi, menganalisis dan mengungkapkan informasi CSR lebih banyak dari pada perusahaan kecil. Perusahaan yang besar juga lebih rentan terhadap pengawasan dari pemangku kepentingan karena mereka lebih sering terlihat oleh kelompok

eksternal dan lebih rentan untuk mendapatkan reaksi buruk dari mereka. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi yang lebih sukarela seperti informasi CSR untuk menjamin pemangku kepentingan sekaligus mengurangi biaya agensi yang timbul akibat dari potensi konflik antara manajemen dan para pemangku kepentingan, seperti yang dikemukakan oleh Archel (2003), Cormier dan Magnan (2003), dan Othman et al. (2009) dalam Naser dan Hassan (2013), serta untuk mengurangi biaya politik karena mereka biasanya lebih terlihat secara publik dibandingkan perusahaan kecil.

Profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio laba bersih terhadap total aset. Rasio ini menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi profitabilitas perusahaan. Jika profitabilitas perusahaan tinggi, perusahaan akan memiliki kapasitas tambahan untuk menyerap kenaikan biaya. Sehingga posisi perusahaan akan menjadi stabil dan kuat untuk menghadapi persaingan di pasar (Pahuja, 2009).

Menurut Pahuja (2009), jika margin laba perusahaan lebih tinggi dari pada margin laba industri, masyarakat akan memiliki keyakinan yang lebih besar pada perusahaan. Perusahaan akan memilih untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut untuk menginformasikan kepada publik tentang kegiatan CSR yang dilakukan olehnya. Jika margin laba rendah, maka perusahaan tidak dapat diharapkan untuk menghabiskan lebih banyak dana pada CSR dan juga akan ragu-ragu dalam mengungkapkan hal itu. Dengan demikian, sebuah perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi diharapkan untuk mengungkapkan informasi rinci tentang kegiatan CSR dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas rendah.

Leverage. *Leverage* adalah jumlah hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Kekuatan kreditor sebagai pemangku kepentingan bergantung pada sejauh mana perusahaan bergantung pada pembiayaan hutang. Perusahaan dengan hutang yang jauh lebih banyak daripada ekuitas dianggap sangat *leverage*. Perusahaan yang sangat *leverage* menjalin hubungan yang lebih dekat dengan kreditur mereka dan mengadopsi cara-cara alternatif untuk mempublikasikan pengungkapan CSR mereka (Branco dan Rodrigues, 2008 dalam Juhmani, 2014).

Tipe Industri. Hubungan antara tipe industri dan tingkat pengungkapan CSR telah diteliti dalam banyak studi teoritis dan empiris karena fakta bahwa masing-masing sektor memiliki beberapa karakteristik khas yang mungkin berhubungan dengan risiko kepada masyarakat, tingkat pertumbuhan potensial, pekerjaan, kompetisi dan campur tangan pemerintah (Ahmad et al, 2003; Gao et al, 2005 dalam Akbas, 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat 1 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Karena perusahaan ini menghabiskan dana dalam jumlah yang signifikan untuk melaksanakan CSR, maka perusahaan akan mengungkapkan informasi CSR yang lebih banyak dalam laporan pelaksanaan CSR dibandingkan dengan perusahaan lainnya.

Umur Perusahaan. Umur perusahaan adalah lama berdirinya suatu perusahaan. Umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bersaing dalam dunia bisnis yang perlu tantangan. Semakin lama perusahaan didirikan, semakin banyak hal yang dipelajari dan semakin banyak perbaikan yang dilakukan. Sebagai perusahaan yang beroperasi lebih lama, akan ada lebih banyak komunikasi dan tuntutan yang dibutuhkan untuk masyarakat luar. Perusahaan akan selalu berusaha untuk memenuhi tuntutan yang diberikan dengan mengekspresikan kegiatan sosial mereka dalam laporan tahunan. Perusahaan akan berusaha meningkatkan praktek pelaporan keuangan mereka dari waktu ke waktu. Semua ini adalah untuk meningkatkan citra perusahaan di mata investor dan publik serta untuk keberlangsungan perusahaan.

Ukuran KAP. Ukuran KAP dapat diklasifikasi menjadi KAP berukuran besar yaitu KAP yang berafiliasi dengan perusahaan audit Big 4 (Pricewaterhouse Coopers, KPMG, Ernst & Young, dan Deloitte & Touche) dan KAP berukuran kecil yang tidak berafiliasi dengan perusahaan audit Big 4.

Menurut Malone et al. (1993) dalam Juhmani (2014), KAP kecil mencoba untuk memenuhi tuntutan klien dalam upaya untuk mempertahankan klien mereka karena kurangnya kekuatan ekonomi. Sedangkan, KAP besar telah berurusan dengan perusahaan multinasional yang melakukan kegiatan usaha mereka di seluruh dunia. Oleh karena itu, pekerjaan mereka lebih cenderung dipengaruhi oleh standar akuntansi internasional. KAP besar memiliki kekuasaan lebih dibandingkan KAP kecil untuk mempengaruhi kliennya sehingga klien mereka akan mengungkapkan lebih banyak informasi keuangan dan non-keuangan dalam laporan tahunan mereka, termasuk informasi mengenai CSR. Selain itu, KAP besar lebih peduli dengan reputasi mereka, sehingga memerlukan pengungkapan yang lebih tinggi dari klien mereka.

Perumusan Hipotesis

- H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR.
H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR.

- H₃: Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR.
 H₄: Kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR.
 H₅: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR.
 H₆: Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR.
 H₇: *Leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR.
 H₈: Tipe industri berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR.
 H₉: Umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR.
 H₁₀: Ukuran KAP berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR.

RANCANGAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dasar dengan sifat kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Tujuan dari penelitian dasar adalah untuk mengembangkan dan mengevaluasi konsep-konsep teoritis dengan harapan bahwa hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori (Indriantoro & Supomo, 2013). Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian kausal komparatif yang meneliti hubungan sebab-akibat antara variabel dependen dan variabel independen (Indriantoro & Supomo, 2013). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan CSR dan variabel-variabel yang mempengaruhinya adalah kepemilikan manjerial, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, tipe industri, umur perusahaan dan ukuran KAP.

Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel diambil dengan metode *purposive sampling*, yaitu dengan mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI dan menyajikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama periode 2010-2014.
2. Perusahaan yang mengungkapkan CSR pada laporan tahunannya.
3. Laporan keuangan perusahaan memiliki data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan CSR. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan mengamati ada atau tidaknya item pengungkapan dalam laporan tahunan. Apabila tidak ada item pengungkapan dalam laporan tahunan maka diberi skor 0 dan apabila ada item pengungkapan dalam laporan tahunan maka diberi skor 1.

Item pengungkapan dalam penelitian ini berdasarkan *ISO 26000 index* yang berisikan 37 item pengungkapan CSR. Item pengungkapan dibagi menjadi tujuh kategori yaitu: tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktek ketenagakerjaan, lingkungan, praktek kegiatan institusi yang sehat, konsumen dan pengembangan masyarakat. Rumus perhitungan pengungkapan CSR menurut Naser dan Hassan (2013) adalah sebagai berikut:

$$\text{Pengungkapan CSR} = \frac{\text{Jumlah item pengungkapan dalam laporan keuangan}}{37 \text{ tem pengungkapan berdasarkan ISO 26000 index}}$$

Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki manajemen perusahaan. Menurut Soliman *et al.* (2012), rumus perhitungan kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah saham yang dimiliki institusi atau lembaga. Soliman *et al.* (2012) mengukur kepemilikan institusional dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

3. Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham yang dimiliki pemerintah. Untuk menghitung kepemilikan pemerintah, Naser dan Hassan (2013) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Pemerintah} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

4. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki investor asing. Rumus perhitungan kepemilikan asing menurut Soliman *et al.* (2012) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh investor asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dinilai dengan menggunakan total aset. Menurut Naser dan Hassan (2013), ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ukuran Perusahaan:

$$= \text{Natural Logaritma Total Aset}$$

6. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba. Rumus perhitungan profitabilitas menurut Akbas (2014) adalah sebagai berikut:

$$\text{Profitabilitas} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

7. Leverage

Leverage adalah ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasinya (Abriyani, Wiryono & Sumirat, 2012). Pengukuran variabel *leverage* menurut Naser dan Hassan (2013) adalah sebagai berikut:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total liabilitas}}{\text{Total aset}}$$

8. Tipe Industri

Industri tertentu dimana sebuah perusahaan tergolong dapat menentukan tingkat pengungkapan CSR. Kriteria untuk menentukan industri berdasarkan penelitian Bayoud *et al.* (2012) adalah sebagai berikut:

Tipe 1 jika perusahaan bergerak dalam sektor Industri manufaktur dan pertambangan
Tipe 0 jika perusahaan tidak bergerak dalam Industri sektor manufaktur dan pertambangan

9. Umur Perusahaan

Umur perusahaan adalah lama berdirinya suatu perusahaan. Menurut Kansal, Joshi, dan Batra (2014), rumus perhitungan umur perusahaan adalah sebagai berikut:

Umur merupakan Selisih antara Tahun Penelitian Perusahaan dengan Tahun Berdirinya perusahaan

10. Ukuran KAP

Ukuran KAP dapat diklasifikasi menjadi perusahaan audit Big 4 dan perusahaan audit non Big 4. KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan perusahaan audit Big 4 adalah sebagai berikut:

1. KAP Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan berafiliasi dengan *Price Waterhouse Coopers* (Price Waterhouse Coopers, 2015).
2. KAP Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja berafiliasi dengan *Ernst and Young* (Ernst & Young, 2013).
3. KAP Osman Bing Satrio dan Eny berafiliasi dengan *Deloitte Touche Tohmatsu* (Deloitte Touche Tohmatsu, 2015).
4. KAP Sidharta dan Widjaja berafiliasi dengan *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (Klynveld Peat Marwick Goerdeler, 2015).

Pengukuran variabel ukuran KAP menurut Uwuigbe (2011) adalah sebagai berikut:

Ukuran KAP = 1 jika auditor berafiliasi dengan perusahaan audit Big 4
Ukuran KAP = 0 jika auditor tidak berafiliasi dengan perusahaan audit Big 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi 0,0000, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manjerial, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, tipe industri, umur perusahaan dan ukuran KAP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Tabel 1

Hasil Uji F

Variabel Dependen	F	Sig.	Kesimpulan
Pengungkapan CSR	81,12019	0,000000	Signifikan

Sumber: Data sekunder diolah, 2015.

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Uji t

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Sig.	Kesimpulan	Hipotesis
(Konstanta)	-0,682411	-10,80731	0,0000		
Kepemilikan Manajerial	-0,050435	-1,107882	0,2681	Tidak Signifikan	Tidak Terbukti
Kepemilikan Institusional	-0,037091	-2,353137	0,0187	Signifikan Negatif	Tidak Terbukti
Kepemilikan Pemerintah	0,231510	9,215398	0,0000	Signifikan Positif	Terbukti
Kepemilikan Asing	0,023946	2,140356	0,0325	Signifikan Positif	Terbukti
Ukuran Perusahaan	0,076369	15,64622	0,0000	Signifikan Positif	Terbukti
Profitabilitas	0,013675	1,444377	0,1488	Tidak Signifikan	Tidak Terbukti
Leverage	-0,005300	-1,127465	0,2597	Tidak Signifikan	Tidak Terbukti
Tipe Industri	0,061667	9,067069	0,0000	Signifikan Positif	Terbukti
Umur Perusahaan	0,000998	4,189356	0,0000	Signifikan Positif	Terbukti
Ukuran KAP	0,025572	3,521243	0,0004	Signifikan Positif	Terbukti

Sumber: Data sekunder diolah, 2015.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hal ini mungkin disebabkan oleh perilaku manajemen yang cenderung fokus pada kinerja perusahaan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan yang akan menguntungkan bagi mereka sebagai manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan daripada pengungkapan CSR (Lucyanda dan Siagian, 2012). Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis tetapi konsisten dengan hasil penelitian terdahulu oleh Huafang dan Jianguo (2007), Rahman dan Widyasari (2008), Said *et al.* (2009), Abriyani *et al.* (2012), Lucyanda dan Siagian (2012) serta Sufian dan Zahan (2013).

Variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dapat dikarenakan semakin tinggi saham yang dimiliki oleh investor institusional, semakin besar kontrol mereka terhadap perusahaan. Karena mereka memiliki kontrol, mereka dapat mengambil alih aset perusahaan dan mengeksploitasi kepentingan minoritas. Akibatnya, mereka mungkin mencegah pengungkapan yang lebih tinggi (Lina, 2013). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis tetapi konsisten dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Lina (2013) dan Ghabayen *et al.* (2015).

Variabel kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pemerintah termasuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik yang tinggi. Perusahaan ini memiliki tekanan lebih untuk terlibat dalam kegiatan CSR dan mengungkapkannya dalam laporan tahunan (Khan *et al.*, 2012). Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan konsisten dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Ghazali (2007), Amran dan Devi (2008), Pahuja (2009), Said *et al.* (2009), Sukcharoensin (2012), Khan *et al.* (2012), Haji (2013), serta Muttakin dan Subramaniam (2015).

Variabel kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini disebabkan oleh tren pelaksanaan kegiatan CSR saat ini merupakan pengaruh dari praktek asing. Oleh

karena itu, semakin tinggi tingkat investor asing, semakin tinggi pengaruh praktek asing pada perusahaan domestik (Soliman *et al.*, 2012). Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan konsisten dengan penelitian oleh Haniffa dan Cooke (2005), Huafang dan Jianguo (2007), Khan (2010), Soliman *et al.* (2012), Khan *et al.* (2012), Bowrin (2013), Muttakin dan Subramaniam (2015) serta Muttakin *et al.* (2015).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang besar melakukan lebih banyak aktivitas, menyebabkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan, memiliki lebih banyak pemegang saham yang peduli dengan program CSR perusahaan sehingga perusahaan yang besar lebih banyak mengkomunikasikan informasi CSR perusahaan dalam laporan tahunan (Lucyanda dan Siagian, 2012). Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan konsisten dengan penelitian terdahulu oleh Hackston dan Milne (1996), Ghazali (2007), Fauzi *et al.* (2007), Huafang dan Jianguo (2007), Amran dan Devi (2008), Pahuja (2009), Khan (2010), Rahman *et al.* (2011), Gamerschlag *et al.* (2011), Uwuigbe (2011), Li *et al.* (2011), Galani *et al.* (2011), Lucyanda dan Siagian (2012), Suttipun dan Stanton (2012), Al-Shubiri *et al.* (2012), Setyorini dan Ishak (2012), Haji (2013), Soliman (2013), Uyar *et al.* (2013), Bowrin (2013), Akrouf dan Othman (2013), Wang *et al.* (2013), Chek *et al.* (2013), Alkababji (2014), Giannarakis (2014), Akbas (2014), Das *et al.* (2015), Muttakin *et al.* (2015), Muttakin dan Subramaniam (2015), serta Al-Ajmi (2015).

Variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya profitabilitas perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Pengungkapan CSR lebih erat berkaitan dengan tekanan publik daripada profitabilitas perusahaan (Ghazali, 2007). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis tetapi konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996), Ghazali (2007), Amran dan Devi (2008), Rahman dan Widyasari (2008),

Khlif dan Souissi (2010), Galani *et al.* (2011), Li *et al.* (2011), Gamerschlag *et al.* (2011), Mia dan Al-Mamun (2011), Rahman *et al.* (2011), Sufian (2012), Esa dan Ghazali (2012), Suttipun dan Stanton (2012), Uyar *et al.* (2013), Bowrin (2013), Chek *et al.* (2013), Haji (2013), Juhmani (2014), Alkababji (2014), Giannarakis (2014), Das *et al.* (2015).

Variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya *leverage* perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Perusahaan dengan struktur pembiayaan utang yang tinggi juga memikul tanggung jawab yang sama seperti perusahaan dengan struktur pembiayaan utang yang rendah dalam hal mengungkapkan kegiatan CSR mereka (Chek *et al.*, 2013). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis tetapi konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Huafang dan Jianguo (2007), Rahman dan Widayari (2008), Khlif dan Souissi (2010), Mia dan Al-Mamun (2011), Rahman *et al.* (2011), Lucyanda dan Siagian (2012), Setyorini dan Ishak (2012), Naser dan Hassan (2013), Haji (2013), Akbas (2014), Giannarakis (2014), Muttakin *et al.* (2015), serta Al-Ajmi *et al.* (2015).

Hasil penelitian menunjukkan variabel tipe industri berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dapat disebabkan oleh tipe industri yang berbeda melakukan kegiatan yang membutuhkan pengungkapan CSR yang berbeda pula (Naser dan Hassan, 2013). Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat 1 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR. Perusahaan yang bergerak di industri manufaktur dan pertambangan ini telah menghabiskan jumlah yang signifikan dalam melaksanakan CSR, maka perusahaan akan mengungkapkan informasi CSR yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di industri lainnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Roberts (1992), Hackston dan Milne (1996), Amran dan Devi (2008), Rahman dan Widayari (2008), Pahuja (2009), Li *et al.* (2011), Bayoud *et al.* (2012), Naser dan Hassan (2013), Bowrin (2013), Akbas (2014), Kansal *et al.* (2014) dan Giannarakis (2014).

Variabel umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. Perusahaan yang berumur lebih tua memiliki keahlian dan kompetensi yang lebih memadai dalam mempersiapkan informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan dan mengetahui dampak informasi terhadap kinerja perusahaan (Bayoud *et al.*, 2012). Hal ini menunjukkan semakin lama perusahaan beroperasi, perusahaan semakin sadar tentang pentingnya mempraktikkan dan mengungkapkan informasi CSR dalam laporan tahunan. Hasil penelitian ini sesuai

dengan hipotesis dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Roberts (1992), Bayoud *et al.* (2012), Al-Shubiri *et al.* (2012), Muttakin *et al.* (2015), Muttakin dan Subramaniam (2015).

Variabel ukuran KAP berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa KAP besar memberikan lebih banyak tekanan pada klien mereka untuk meningkatkan kebijakan pengungkapan perusahaan termasuk pengungkapan CSR dalam hal kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor atas laporan tahunan perusahaan (Khlif dan Souissi, 2010). Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Khlif dan Souissi (2010), Uwuigbe (2011), Uwuigbe dan Egbide (2012), Sallehuddin (2013), Uyar *et al.* (2013) dan Juhmani (2014).

Hasil *uji goodness of fit model* pada Tabel 3 menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,338317. Dengan demikian variasi pada variabel kepemilikan manjerial, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, tipe industri, umur perusahaan dan ukuran KAP menjelaskan 33,8317% variasi pada pengungkapan CSR, sedangkan 66,1683% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model antara lain komite audit, komisaris independen (Rouf, 2011), frekuensi rapat dewan (Sallehuddin, 2013), ukuran dewan, direktur non-eksekutif (Hassn, 2014) dan variabel-variabel lainnya.

Tabel 3
Hasil Uji Goodness of Fit Model

<i>Variabel Dependen</i>	<i>Adjusted R²</i>
Pengungkapan CSR	0,338317

Sumber: Data sekunder diolah, 2015.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR melalui variabel kepemilikan pemerintah, serta kepemilikan asing, dan karakteristik perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR melalui variabel ukuran perusahaan, tipe industri, umur perusahaan, serta ukuran KAP, hal ini konsisten dengan hipotesis penelitian. Sedangkan variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan CSR dan variabel kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan

CSR, hal ini tidak konsisten dengan hipotesis penelitian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, tipe industri, umur perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik maka semakin banyak pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan dan semakin besar kepemilikan institusional maka semakin sedikit pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini juga menunjukkan besar atau kecilnya variabel kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan *leverage* tidak mempengaruhi pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan secara signifikan.

Keterbatasan

Keterbatasan - keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan dapat mengungkapkan CSR melalui mekanisme yang berbeda seperti *website* dan laporan berkelanjutan. Sumber data pengungkapan CSR dalam penelitian ini diperoleh terbatas pada laporan tahunan perusahaan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data kuantitatif yang diperoleh melalui laporan keuangan dan tahunan perusahaan tidak dikombinasikan dengan dimensi kualitatif.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian dengan mempertimbangkan indeks dan media pengungkapan CSR lainnya seperti *website* dan laporan berkelanjutan (Gamerschlag et al., 2011; Juhmani, 2014; Kuhn, Stiglbauer, & Fifka, 2015).
2. Melakukan penelitian dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Abriyani, D. R., Wiryono, S. K., & Sumirat, E. (2012). The effect of good corporate governance and financial performance on the corporate social responsibility disclosure of telecommunication company in Indonesia. *The Indonesian Journal Of Business Administration*, 1(5), 296-300.
- Akbas, H. E. (2014). Company characteristics and environmental disclosure: an empirical investigation on companies listed on bursa Istanbul 100 index. *The Journal of Accounting and Finance*, 145-164.
- Akrouf, M. M., & Othman, H. B. (2013). A study of the determinants of corporate environmental disclosure in MENA emerging markets.

Journal of Reviews on Global Economics, 2, 46-59.

- Al-Ajmi, M., Al-Mutairi, A., & Al-Duwaila, N. (2015). Corporate social disclosure practices in Kuwait. *International Journal of Economics and Finance*, 7(9), 244-254.
- Alkababji, M. W. (2014). Voluntary disclosure on corporate social responsibility: A study on the annual reports of Palestinian corporations. *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, 2(4), 59-82.
- Al-Shubiri, F. N., Al-Abedallat, A. Z., & Orabi, M. M. A. (2012). Financial and non financial determinants of corporate social responsibility. *Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology*, 106-118.
- Amran, A., & Devi, S. S. (2008). The impact of government and foreign affiliate influence on corporate social reporting: the case of Malaysia. *Managerial Auditing Journal*, 23(4), 386-404.
- Bayound, N. S., Kavanagh, M., & Slaughter, G. (2012). Factors influencing levels of corporate social responsibility disclosure by Libyan firms a mixed study. *International Journal of Economics and Finance*, 4(4), 13-29.
- Bowrin, A. R. (2013). Corporate social and environmental reporting in the Caribbean. *Social Responsibility Journal*, 9(2), 259-280.
- Chek, I. T., Mohamad, Z. Z. B., Yunus, J. N., & Norwani, N. M. (2013). Corporate social responsibility (CSR) disclosure in consumer products and plantation industry in Malaysia. *American International Journal of Contemporary Research*, 3(5), 118-125.
- Das, S., Dixon, R., & Michael, A. (2015). Corporate social responsibility reporting: A longitudinal study of listed banking companies in Bangladesh. *World Review of Business Research*, 5(1), 130-154.
- Deloitte Touche Tohmatsu. (2015). *Global office directory*. Retrieved November 30, 2015, from <http://www2.deloitte.com/id/en/footerlinks/office-locator.html>
- Ernst & Young. (2013). *Worldwide corporate tax guide 2013-2014*. Retrieved from <http://www.ey.com/GL/en/home/library>
- Esa, E., & Ghazali, N. A. M. (2012). Corporate social responsibility and corporate governance in Malaysian government-linked companies. *Corporate Governance: The international journal of business in society*, 12(3), 292-305.
- Fauzi, H., Mahoney, L., & Rahman, A. A. (2007). Institutional ownership and corporate social performance: Empirical evidence from Indonesian companies. *Issues in Social and Environmental Accounting*, 1(2), 334-347.
- Fombrun, C. J., Gardberg, N. A., & Sever, J. M. (2000). The reputation quotient SM: A multi-stakeholder measure of corporate reputation.

- The Journal of Brand Management*, 7(4), 24-255.
- Galani, D., Gravas, E., & Stavropoulos, A. (2011). The relation between firm size and environmental disclosure. *International Conference On Applied Economics*, 179-186.
- Gamerschlag, R., Möller, K., & Verbeeten, F. (2011). Determinants of voluntary CSR disclosure: Empirical evidence from Germany. *Rev Manag Sci*, 5, 233-262. DOI: 10.1007/s11846-010-0052-3
- Ghabayen, M. A., Mohamad, N. R., & Ahmad, N. (2015). Institutional directors and corporate social responsibility disclosure in the Jordanian banks. *International Conference on Accounting Studies*, 287-296.
- Ghazali, N. A. M. (2007). Ownership structure and corporate social responsibility disclosure: Some Malaysian evidence. *Corporate Governance: The international journal of business in society*, 7(3), 251-266.
- Giannarakis, G. (2014). Corporate governance and financial characteristic effects on the extent of corporate social responsibility disclosure. *Social Responsibility Journal*, 10(4), 569-590.
- Giannarakis, G. (2014). The determinants influencing the extent of CSR disclosure. *International Journal of Law and Management*, 56(5), 393-416.
- Giannarakis, G., Konteos, G., & Sariannidis, N. (2014). Financial, governance and environmental determinants of corporate social responsible disclosure. *Management Decision*, 52(10), 1928-1951.
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure. *G Auditing & Accountability Journal*, 8(2), 47-77. <https://doi.org/10.1108/09513579510146996>
- Habbash, M. (2016). Corporate governance and corporate social responsibility disclosure: Evidence from Saudi Arabia. *Journal of Economic and Social Development*, 3(1), 87-103.
- Hackston D., & Milne, M. J. (1996). Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand companies. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 9(1), 77-108.
- Haji, A. A. (2013). Corporate social responsibility disclosures over time: evidence from Malaysia. *Managerial Auditing Journal*, 28(7), 647-676.
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2005). The impact of culture and governance on corporate social reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24, 391-430.
- Hassn, N. T. (2014). Corporate governance, degree of multinationality, and corporate social responsibility disclosure: evidence from the UK. *Journal of Empirical Research in Accounting & Auditing*, 1(1), 75-98.
- Herbohn, K., Walker, J., & Loo, H. Y. M. (2014). Corporate social responsibility: The link between sustainability disclosure and sustainability performance. *Abacus*, 50(4), 422-459.
- Huafang, X., & Jianguo, Y. (2007). Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure. *Managerial Auditing Journal*, 22(6), 604-619.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *Standar akuntansi keuangan per 1 Juni 2012*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi & manajemen* (edisi pertama). Yogyakarta: BPFE.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Juhmani, O. (2014). Determinants of corporate social and environmental disclosure on websites: the case of Bahrain. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 2(4), 77-87.
- Kansal, M., Joshi, M., & Batra, G. S. (2014). Determinants of corporate social responsibility disclosures: evidence from India. *Advanced in Accounting*, 30(1), 217-229.
- Khan, A. R., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2012). Corporate governance and corporate social responsibility disclosures: Evidence from an emerging economy. *Journal of Business Ethics*, 1-41.
- Khan, M. H. (2010). The effect of corporate governance elements on corporate social responsibility (CSR) reporting. *International Journal of Law and Management*, 52(2), 82-109.
- Khlif, H., & Souissi, M. (2010). The determinants of corporate disclosure: A meta-analysis. *International Journal of Accounting and Information Management*, 18(3), 198-219.
- Klynveld Peat Marwick Goerdeler. (2015). *Contact us: Locations*. Retrieved 2015, from <http://www.kpmg.com/global/en/pages/location.s.aspx>
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Kuhn, A., Stiglbauer, M., & Fifka, M. S. (2015). Contents and determinants of corporate social responsibility website reporting in Sub-Saharan Africa. *Business & Society*, 1-44.
- Li, N., Toppinen, A., Tuppara, A., Puumalainen, K., & Hujala, M. (2011). Determinants of sustainability disclosure in the global forest industry. *Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies*, 16(1), 33-40.

- Lina, S. K. (2013). The effect of corporate governance mechanism on the corporate social responsibility disclosure: Evidence in Indonesia. *Brawijaya International Conference on Accounting and Business*.
- Lucyanda, J., & Siagian, L. G. P. (2012). The influence of company characteristics toward corporate social responsibility disclosure. *The 2012 International Conference on Business and Management*, 601-619.
- Mia, P., & Mamun, A. A. (2011). Corporate social disclosure during the global financial crisis. *International Journal of Economics and Finance*, 3(6), 174-187. DOI: 10.5539/ijef.v3n6p174
- Muttakin, M. B., Khan, A., & Subramaniam, N. (2015). Firm characteristics, board diversity and corporate social responsibility: Evidence from Bangladesh. *Pacific Accounting Review*, 27(3), 353-372.
- Muttakin, M. B., & Subramaniam, N. (2015). Firm ownership and board characteristics: Do they matter for corporate social responsibility disclosure of Indian companies? *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 6(2), 138-165.
- Naser, K., & Hassan, Y. (2013). Determinants of corporate social responsibility reporting: evidence from an emerging economy. *Journal of Contemporary Issues in Business Research*, 2(3), 56-74.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Roadmap tata kelola perusahaan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pahuja, S. (2009). Relationship between environmental disclosures and corporate characteristics: A study of large manufacturing companies in India. *Social Responsibility Journal*, 5(2), 227-244.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara
- Price Waterhouse Coopers. (2015). *Member firms worldwide*. Retrieved November 30, 2015, from <http://www.pwc.com/gx/en/office-locations/indonesia.jhtml>
- Rahman, A., & Widayarsi, K. N. (2008). The analysis of company characteristic influence toward CSR disclosure: Empirical evidence of manufacturing companies listed in jsx. *JAAI*, 12(1), 25-35.
- Rahman, N. H. W. A., Zain, M. M., & Al-Haj, N. H. Y. Y (2011). CSR disclosures and its determinants: Evidence from Malaysian government link companies. *Social Responsibility Journal*, 7(2), 181-201.
- Ramdhony, D., & Oogarah-Hanuman, V. (2012). Improving CSR reporting in mauritius accountants' perspectives. *World Journal of Social Sciences*, 2(4), 195-207.
- Roberts, R. W. (1992). Determinants of corporate social responsibility disclosure: an application of stakeholder theory. *Accounting Organizations and Society*, 17(6), 595-612.
- Rouf, M. A. (2011). The corporate social responsibility disclosure: a study of listed companies in Bangladesh. *Business and Economics Research Journal*, 2(3), 19-32.
- Rusmanto, T., Waworuntu, S. R., & Syahbandiah, V. P. (2013). The impact of corporate governance on corporate social responsibility disclosure: Evidence from indonesia. *Handbook on the Emerging Trends in Scientific Research*, 377-385.
- Said, R., Zainuddin, Y. H., & Haron, H. (2009). The relationship between corporate social responsibility disclosure and corporate governance characteristics in Malaysian public listed companies. *Social Responsibility Journal*, 5(2), 212-226.
- Sallehuddin, M. R. (2013). Corporate social responsibility disclosure: evidence from shariah-compliant companies in ACE market of bursa Malaysia. *Terengganu International Management and Business Journal*, 3(2), 1-18.
- Setyorini, C. T., & Ishak, Z. (2012). Corporate social and environmental disclosure: a positive accounting theory view point. *International Journal of Business and Social Science*, 3(9), 152-164.
- Soliman, M. M. (2013). Firm characteristics and the extent of voluntary disclosure: The case of egypt. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(17), 71-80.
- Soliman, M. M., Din, M. B. E., & Sakr, A. (2012). Ownership structure and corporate social responsibility (CSR): An empirical study of the listed companies in egypt. *The International Journal of Social Sciences*, 5(1), 63-74.
- Sufian, M. A. (2012). Corporate social responsibility disclosure in Bangladesh. *Global Journal of Management and Business Research*, 12(4), 149-155.
- Sufian, M. A., & Zahan, M. (2013). Ownership structure and corporate social responsibility disclosure in Bangladesh. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 3(4), 901-909.
- Sukcharoensin, S. (2012). The determinants of voluntary CSR disclosure of Thai listed firms. *International Proceedings of Economics Development & Research*, 46, 61-65.
- Sundarasan, S. D. V., Je-Yen, T., Rajangam, N. (2016). Board composition and corporate social responsibility in an emerging market. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 16(1), 35-53.

- Suttipun, M., & Stanton, P. (2012). Determinants of environmental disclosure in thai corporate annual reports. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 2(1), 99-115.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Uwuigbe, U. (2011). An examination of the relationship between management ownership and corporate social responsibility disclosure: A study of selected firms in Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting*, 2(6), 23-29.
- Uwuigbe, U. (2011). An empirical investigation of the association between firms' characteristics and corporate social disclosures in the Nigerian financial sector. *Journal of Sustainable Development in Africa*, 13(1), 60-74.
- Uwuigbe, U., & Egbide, B. C. (2012). Corporate social responsibility disclosures in Nigeria: A study of listed financial and non-financial firms. *Journal of Management and Sustainability*, 2(1), 160-169.
- Uyar, A., Kilic, M., & Bayyurt, N. (2013). Association between firm characteristics and corporate voluntary disclosure: Evidence from turkish listed companies. *Intangible Capital*, 9(4), 1080-1112.
- Wang, J., Song, L., & Yao, S. (2013). The determinants of corporate social responsibility disclosure: Evidence from china. *The Journal of Applied Business Research*, 29(6), 1833-1848.
- World Business Council for Sustainable Development. (n.d.). *Corporate social responsibility (CSR)*. Retrieved from <http://www.wbcsd.org/work-program/business-role/previous-work/corporate-social-responsibility.aspx>
- Yusoff, H., Mohamad, S.S., & Darus, F. (2013). The influence of CSR disclosure structure on corporate financial performance: Evidence from stakeholders' perspectives. *Procedia Economics and Finance, International Conference on Economics and Business Research 2013 (ICEBR 2013)*, 7, 213-220.